



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN TENGAH (UIP SBT)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRO PRASETYAWAN
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 470383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.630.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **814.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI ZX25R Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **55.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	539.067.176
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.038.067.176
III. HUTANG	Rp.	755.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.283.067.176

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.